

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Gunung Agung.
- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Anwar, 2015. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Cet ke-3. Malang: Setara Press.
- Arifin, Syamsul. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia* Medan: Medan area University.
- Badan Pertanahan Nasional. *Himpunan Karya tulis pendaftaran tana., Kumpulan Penelitian*.
- Chomzah, Ali Achmad. 2002. *Hukum Pertanahan: Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. ke-1. Jakarta: Prenada Media Group.
- Harsono, Boedi. 2002. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djamban.
- _____, Boedi, 2002. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____, Philipus M. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction To The Indonesian Administration Law*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Hadikusuma, Hilman H. 2010. *Bahasa Hukum Indonesia*. Cet ke-4. Bandung: Alumni.
- Harsono, Boedi. *Beberapa Analisis Tentang Hukum Agraria II*. Jakarta: Esa Studi Klub.
- Ismaya, Samun. 2013. *Hukum Administrasi Pertanahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Khairandy, Ridwan. 2015. *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- _____. Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Cet. ke-7. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Cet ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sahnan. 2016. *Hukum Agraria Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Santoso, Urip. 2009. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Cet. Ke- 5. Jakarta: Kencana.
- _____. Urip. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen* Bandar Lampung: Universitas Lampung.

- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia* Bandung: Alfabeta.
- Soerodjo, Irawan. 2003. *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*, Cet. Ke- 1. Jakarta: Arkola Surabaya.
- Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Cet. ke-11.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet ke-3. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tehupeiory, Aartje. 2012. *Pentingnya pendaftaran tanah di Indonesia*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup.

B. Jurnal

- Aditama Purna Noor “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli” *Lex Renaissance*, Vol. 3, No. 1 (Januari 2018): 189-205.
- Bagus, Ida Paramaningrat Manuaba, et al., 2018. “*Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik*”. Jakarta: *Acta Comitatus*.
- Nurlete Maimunah “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Palsu Berdasarkan Pelanggaran Jenis Norma dan Sanksinya. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/Pid.B/Pn.Tjk)”, *Indonesian Notary*, Vol. 5 No. 3 (Januari 2020): 378-401.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Cet. ke-5. (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2016).

_____, *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

UU No.5 Tahun 1960 LN No. 104, TLN No. 2043.

_____, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*. UU No. 39 Tahun

1999 LN No. 165, TLN No. 3886.

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*. UU No. 24

Tahun 1997 LN No. 28, TLN No. 2171.

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat*

Pembuat Akta Tanah. UU No. 37 Tahun 1998 *juncto* *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor*

37 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. PP No. 24 Tahun 2016 LN No. 52, TLN No. 3746.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Negara*

Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999

tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah

Negara dan Hak Pengelolaan. PMNA No. 9 Tahun 1999.

Badan Pertanahan Nasional. *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional*

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Perkaban No. 3
tahun 2011.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jakarta: PT Balai Pustaka, 2015.